

LAPORAN PENELITIAN

PELAKSANAAN ANALISIS MATERI KURIKULUM SMA 1984
DALAM BIDANG STUDI PMP DAN TATA NEGARA
DI SMA NEGERI KODYA PADANG



Oleh :

Drs. Karjuni Dt. Maani
(Ketua Peneliti)

MIEK PERPUSTAKAAN IKIP PADANG	
DITERIMA TEL	18-6-96
SUMBER/HARGA	H/D
KOLEKSI	KKI
NO INVENTARIS	208/hly/96-p.2/2/
KLASIFIKASI	375 DAT p.2

Penelitian ini dibiayai oleh :
Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas IKIP Padang
Tahun Anggaran 1994 / 1995
Surat Perjanjian Kerja Nomor : 007 / PT37.H8/N.1.4.2/1994
Tanggal 15 Juni 1994

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG
1995

MIEK UPT PERPUSTAKAAN
IKIP PADANG

PELAKSANAAN ANALISIS MATERI KURIKULUM SMA 1984
DALAM BIDANG STUDI PMP DAN TATA NEGARA
DI SMA NEGERI KODYA PADANG

Personalia Peneliti :

Pembimbing : Drs. H. Zurmaini Yunus
Ketua : Drs. Karjuni Dt. Maani
Anggota : Drs. Syafri Anwar

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pelaksanaan Analisis Materi Kurikulum SMA 1984 dalam Bidang Studi PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kodya Padang. Sebelum penelitian ini dilakukan dikemukakan asumsi bahwa kualifikasi pendidikan guru PMP dan Tata Negara di SMA saat ini bervariasi, bahkan terdapat guru yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya.

Populasi Penelitian ini adalah seluruh SMA Negeri yang berkedudukan di Kodya Padang. Dengan jumlah 12 buah diwaktu penelitian ini dilaksanakan. Sampel diambil secara bertahap dan berlapis: Pertama, dari 12 SMA Negeri diambil 6 sebagai sampel, yang digolongkan atas dua kriteria, yaitu SMA lama dan SMA baru. Kedua, dari 6 SMA sampel, akan dipilih 3 SMA lama dan 3 SMA baru, pada masing-masing SMA akan diambil 2 kelas yang tidak paralel yang mempelajari PMP dan Tata Negara. Dalam hal ini akan terpilih 12 kelas sampel dari SMA lama dan SMA baru. Maka dari 12 kelas sampel akan terdapat 12 orang guru PMP dan 12 orang guru Tata Negara. Berkaitan dengan kriteria tersebut sampel diambil secara Stratifiet Random Sampling dengan jumlah sampel 50% atau 24 orang guru PMP dan Tata Negara. Dan data yang diperoleh untuk pengolahan selanjutnya digunakan analisis diskriptif, dengan tabel distribusi frekuensi atau persentase.

Dari hasil temuan, ternyata pelajaran PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kodya Padang diajarkan oleh guru-guru yang memiliki ijazah yang relevan. Tetapi mayoritas (73,34%) mereka belum melaksanakan analisis materi pelajaran. Hal ini terungkap dari ruang lingkup bahan dan alokasi waktu yang diperlukan sama dengan kurikulum. Dan masih ditemui persamaan materi pelajaran PMP dan Tata Negara sejumlah 28,57%.

PENGANTAR

Kegiatan penelitian merupakan bagian dari darma perguruan tinggi, di samping pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian ini harus dilaksanakan oleh IKIP Padang yang dikerjakan oleh staf akademiknya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, melalui peningkatan mutu staf akademik, baik sebagai dosen maupun peneliti.

Kegiatan penelitian ini mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal ini Lembaga Penelitian IKIP Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana IKIP Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. Oleh karena itu, peningkatan mutu tenaga akademik peneliti dan hasil penelitiannya dilakukan sesuai dengan tingkatan serta kewenangan akademik peneliti.

Saya menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan, baik yang bersifat interaksi berbagai faktor yang mempengaruhi praktek kependidikan, penguasaan materi bidang studi, ataupun proses pengajaran dalam kelas yang salah satunya muncul dalam kajian ini. Hasil penelitian seperti ini jelas menambah wawasan dan pemahaman kita tentang proses pendidikan. Walaupun hasil penelitian ini mungkin masih menunjukkan beberapa kelemahan, namun saya yakin hasilnya dapat dipakai sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Kami mengharapkan di masa yang akan datang semakin banyak penelitian yang hasilnya dapat langsung diterapkan dalam peningkatan dan pengembangan teori dan praktek kependidikan.

Hasil penelitian ini telah mengikuti prosedur dan proses pemeriksaan yang berlaku di Lembaga Penelitian IKIP Padang, yaitu melalui telaah tim pereviu usul dan laporan penelitian, yang dilakukan secara "blind reviewing", dan seminar penelitian yang

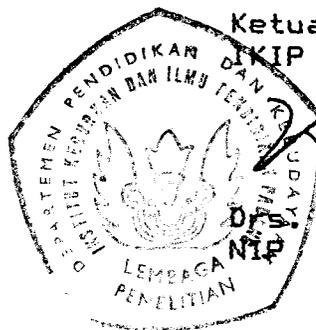
melibatkan dosen senior dan tim Kredit Point IKIP Padang. Mudah-mudahan penelitian ini juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya dan peningkatan mutu staf akademik IKIP Padang.

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, tim pereviu Lembaga Penelitian, Dosen Senior dan anggota tim Kredit Point IKIP Padang yang menjadi pembahas utama dalam seminar penelitian. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerja sama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Kerja sama yang baik ini diharapkan akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih.

Padang, Februari 1995

Ketua Lembaga Penelitian
IKIP Padang



Kumail
Drs. Kumaidi, M.A., Ph.D
NIP 130 605 231

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Pembatasan Masalah	3
C. Perumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Asumsi	5
F. Pertanyaan Penelitian	6
G. Kegunaan Hasil Penelitian	6
H. Defenisi Operasional Variabel	7
BAB II TELAAH KEPUSTAKAAN	10
A. Kajian Teoritis	10
B. Kerangka Konseptual	13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	16
A. Populasi dan Sampel	16
B. Jenis, Sumber dan Alat Pengumpul Data ..	18
C. Teknik Analisa Data	20
D. Rancangan Penelitian	20
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	22
A. Temuan	22
B. Pembahasan	31
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	34
A. Kesimpulan	34
B. Saran	34
DAFTAR KEPUSTAKAAN	36

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel III.1 : SMA Negeri Kodya Padang Menurut Kecamatan	16
Tabel III.2 : Distribusi Sampel SMA Kodya Padang ..	17
Tabel III.3 : Jenis, Sumber dan Alat Pengumpul Data	20
Tabel IV.1 : Distribusi Pendidikan Terakhir Guru PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kodya Padang	22
Tabel IV.2 : Jurusan Pendidikan Guru PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kodya Padang	23
Tabel IV.3 : Pengalaman Mengajar Guru PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kodya Padang ...	24
Tabel IV.4 : Relevansi Alokasi Waktu dengan Jam Yang Tersedia dalam Kurikulum	26
Tabel IV.5 : Kesesuai Tata Urutan Penyajian Bahan Dengan Jadwal Semester yang ada Dalam Kurikulum	27

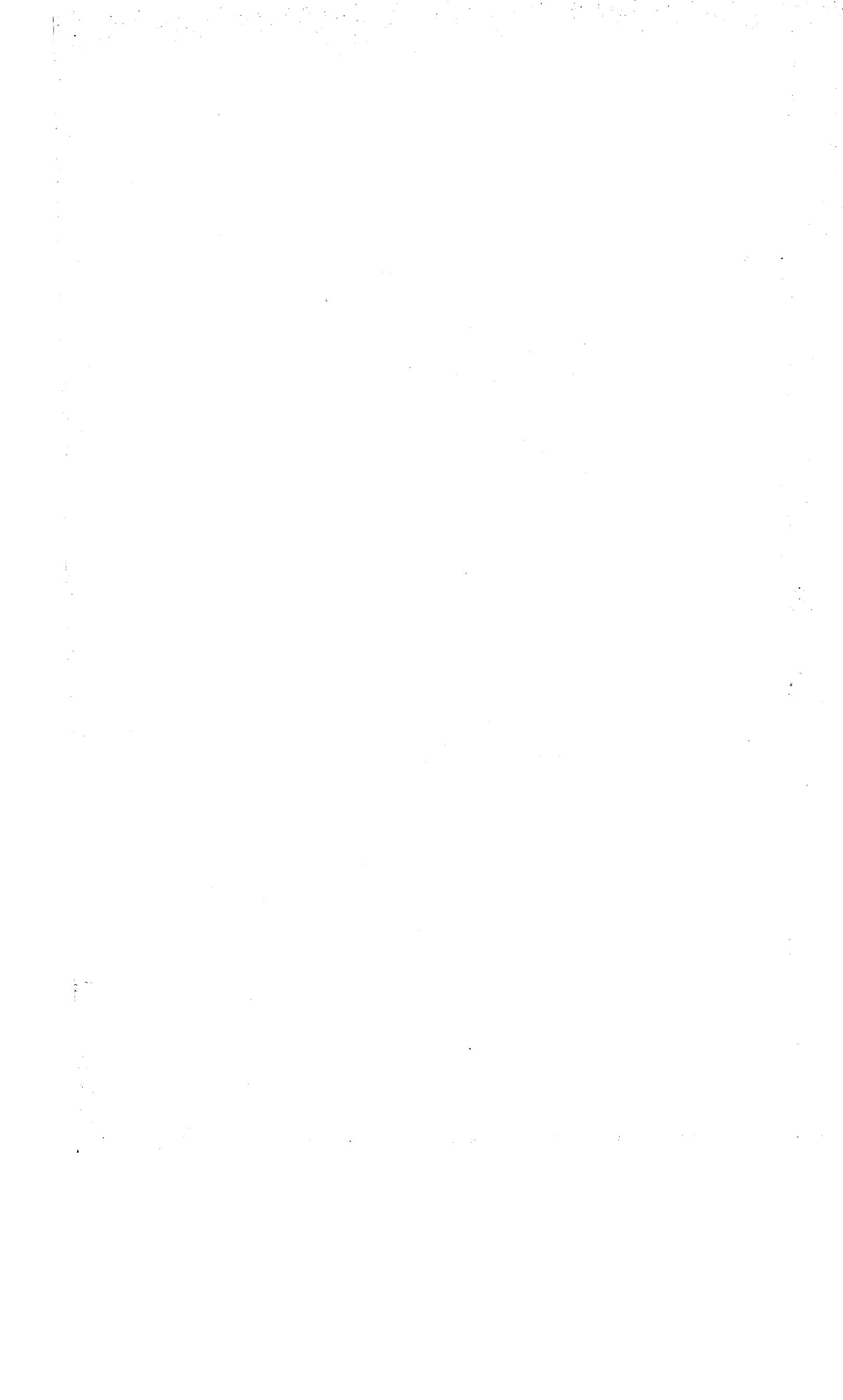
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini pendidikan merupakan topik dan masalah yang paling hangat dibicarakan orang disetiap lingkungan dan lapisan masyarakat, mulai dari orang awam, cerdik cendikiawan, sampai kepada politiksi dan pejabat tingkat nasional, pokok pembicaraannya pun meliputi segala aspek dan masalah yang berkenaan dengan pendidikan, seperti daya tampung sekolah, mutu lulusan, sarana dan prasarana, personel, metoda pembelajaran, pengorganisasian, kurikulum, lingkungan dan pengelolaan, dan kaitan pendidikan dengan pengangguran.

Dari kenyataan dan argumentasi di atas, kurikulum merupakan salah satu dari elemen yang sangat penting dalam keseluruhan proses pendidikan. Di Indonesia kurikulum untuk semua jenis dan jenjang pendidikan dirancang secara nasional. Namun demikian keseragaman itu tidak menutup kemungkinan keanekaan pelaksanaan dalam batas-batas yang ditetapkan. Keadaan itu membawa kepada dua konsekuensi bagi tenaga kependidikan. Pertama ia harus benar-benar memahami kurikulum yang telah ditetapkan secara nasional dalam semua aspeknya, dan kedua, ia harus mempunyai kemampuan adaptasi, atau penyesuaian kurikulum itu dengan keadaan lingkungan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Usaha pembaharuan dalam dunia pendidikan kini tengah berlansung di negara kita, dimana setiap program yang telah dilaksanakan termasuk kurikulum pengajaran, proses implementasinya harus dievaluasi dan di kontrol, dan diadakan lebih mengarah kepada penyederhanaan materi pelajaran, sehingga mencakup materi - materi yang penting saja. Dengan berkurangnya kepadatan materi kurikulum memungkinkan terlaksananya kegiatan belajar yang lebih baik (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992, hal 67).

Kurikulum SMA 1984 sudah menyediakan berbagai bidang studi/mata pelajaran yang merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dimana siswa digolongkan atau dikelompokkan atas beberapa program studi, yaitu program A1 (Fisika), A2 (Biologi), A3 (Sosial) dan A4 (Budaya).

Khusus untuk siswa yang tergolong kepada program A3 ada 15 mata pelajaran yang harus diikutinya, dibedakan atas program inti dan pilihan, untuk program inti ada 12 mata pelajaran, dan program pilihan ada 3 mata pelajaran. Isu yang berkembang belakangan ini, dari sekian banyak mata pelajaran itu, ada terjadi tumpang tindih lingkup materi pelajaran yang akan disajikan kepada siswa, yaitu pada lingkup materi mata pelajaran PMP dan Tata Negara.

Sehubungan dengan itu, maka guru perlu menganalisis materi pelajaran yang pokok dan uraiannya telah digariskan dalam GBPP bidang studi/mata pelajaran, dengan memperhatikan buku paket yang berkaitan dengan pokok bahasan tersebut dan sumber-sumber bahan yang relevan, dan sanggup melaksanakan seleksi, berani melewati pokok-pokok bahasan tertentu dan pandai menggabungkan bahan yang tercantum dalam kurikulum (Ad Rooijakeras, 1988, hal 22). Karena Kurikulum/GBPP hanya membuat garis-garis besar materi pelajaran, yang masih harus dijabarkan atau dirinci menjadi materi esensial oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.

Berangkat dari kenyataan-kenyataan dan argumentasi diatas, maka masalah ingin diketahui lebih mendalam, apakah guru bidang studi PMP dan Tata Negara di SMA melakukan analisis materi pelajaran, masalah tersebut diangkat dalam judul penelitian, dan akan diteliti dengan ruang lingkup SMA Negeri Kota Madya Padang.

B. Pembatasan Masalah

Berkaitan dengan judul penelitian ini dengan ruang lingkup SMA Negeri Kota Madya Padang, maka masalah yang dibahas dibatasi dengan variabel-variabel sebagai berikut:

- 1) Latar belakang pendidikan guru PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kota Madya Padang yang meliputi pendidikan terakhir, latar belakang jurusan,

dan pengalaman mengajar.

- 2) Persamaan materi pelajaran PMP dan Tata Negara di kelas yang paralel, pada setiap semester.
- 3) Pelaksanaan analisis materi pelajaran PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kota Madya Padang, yang berkaitan dengan relevansi jadwal penja - jian bahan dan alokasi waktu dengan kurikulum pada setiap semester, di kelas yang paralel.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup pem- batasan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, ma- ka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah pelajaran PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kota Madya Padang diajarkan oleh guru yang memiliki ijazah yang relevan?
- 2) Apakah guru PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kota Madya Padang melaksanakan analisis materi pelajaran dalam mencapai tujuan pengajaran?
- 3) Apakah terdapat persamaan materi antara pela - jaran PMP dan Tata Negara dalam kurikulum SMA 1984?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mendapatkan informasi dari pihak SMA yang berada di-

Kota Madya Padang, tentang masalah yang dialami dalam menganalisis materi pelajaran.

Sedangkan secara khusus penelitian ini diharapkan akan mengungkapkan informasi-informasi sebagai berikut:

- 1) Informasi tentang latar belakang pendidikan guru PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kota Madya Padang.
- 2) Informasi mengenai pelaksanaan analisis materi pelajaran PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kota Madya Padang.
- 3) Informasi tentang persamaan materi pelajaran PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kota Madya Padang.

E. A s u m s i

- 1) Kurikulum sangat memegang peranan penting dalam pencapaian hasil suatu pelajaran.
- 2) Materi kurikulum bidang studi PMP dan Tata Negara, sesuai dengan kurikulum SMA 1984 diajarkan oleh guru-guru yang kualifikasi pendidikannya bervariasi, bahkan terdapat guru yang latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan bidang studi yang diajarkannya.
- 3) Keberhasilan siswa dalam mempelajari PMP dan Tata Negara ditentukan oleh relevansi guru yang bersangkutan menurut ijazah yang diperolehnya.

- 4) Pelajaran PMP dan Tata Negara yang diajarkan oleh guru yang relevan cenderung lebih meningkatkan prestasi belajar siswa.
- 5) Belum semua guru melaksanakan analisis materi pelajaran (task analysis) untuk dijabarkan menjadi materi esensial.
- 6) Selama ini guru menjadikan kurikulum atau GBPP sebagai tujuan. Dimana kalau guru sudah menyelesaikan materi yang disediakan dalam GBPP/ kurikulum, kepuasan telah mengalir dihatinya.

F. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Apakah pelajaran PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kota Madya Padang diajarkan oleh guru-guru yang mempunyai ijazah yang relevan?
- 2) Apakah guru PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kota Madya Padang melaksanakan analisis materi pelajaran?
- 3) Apakah terdapat persamaan materi antara pelajaran PMP dengan Tata Negara dalam kurikulum SMA 1984.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memberi faedah untuk digunakan sebagai:

KEPUSASTAKAAN
KOTA PADANG

- 1) Bahan pertimbangan bagi Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menyusun kurikulum yang lebih baik dimasa yang akan datang dalam bidang studi PMP dan Tata Negara.
- 2) Input bagi guru PMP dan Tata Negara untuk menentukan materi esensial dari kedua mata pelajaran tersebut.
- 3) Masukan bagi guru PMP dan Tata Negara dalam menyusun rencana pengajaran, agar proses belajar mengajar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

I. Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan kata-kata pada penelitian ini, ada baiknya diberikan definisi variabel supaya terdapat kesamaan penafsiran dalam mendefinisikan kata-kata yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Analisis Materi Pelajaran

Yang dimaksud dengan analisis materi pelajaran (AMP) dalam penelitian ini adalah mengkaji dan memperinci butir-butir isi pokok bahasan yang yang perlu ditekankan dalam kegiatan belajar mengajar, dan menetapkan materi yang tidak perlu disajikan meskipun ada dalam buku paket dan sumber bahan lainnya, yang berkaitan dengan materi pelajaran PMP dan Tata Negara berdasarkan kurikulum SMA 1984.

2) Pendidikan Moral Pancasila (PMP)

Pendidikan Moral Pancasila adalah pendidikan tentang nilai-nilai yang sasarannya bukan semata-mata pengalihan pengetahuan, melainkan lebih ditekankan pada pembentukan sikap, yang diajarkan mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta. Dengan ruang lingkup pokok-pokok bahasannya sebagai berikut:

- 2.1 Kerukunan hidup antar umat beragama
- 2.2 Semangat kekeluargaan
- 2.3 Hidup bermasyarakat
- 2.4 Perjuangan membela dan mempertahankan kemerdekaan
- 2.5 Wawasan nusantara
- 2.6 Rasa persatuan dan kesatuan bangsa
- 2.7 Demokrasi Pancasila
- 2.8 Hidup sederhana
- 2.9 Penghargaan hasil karya orang lain
- 2.10 Kesejahteraan sosial
- 2.11 Tolong menolong sesama warga
- 2.12 Lembaga perwakilan rakyat
- 2.13 Hak asasi manusia dalam UUD 1945
- 2.14 Menggalang persahabatan antar bangsa
- 2.15 Pengamalan sila persatuan
- 2.16 Pancasila sumber dari segala sumber hukum
- 2.17 Pengamalan sila keadilan sosial
- 2.18 Teknologi dan pembangunan
- 2.19 Kelestarian hidup bangsa Indonesia (Depdikbud, 1990, hal. 57)

3) Tata Negara

Tata Negara adalah ilmu yang mempelajari negara tertentu, yang menyelidiki dan membahas tentang:

- 3.1 Pengertian negara
- 3.2 Unsur-unsur terbentuknya negara
- 3.3 Teori-teori tujuan negara
- 3.4 Bentuk negara, pemerintahan dan demokrasi

- 3.5 Norma-norma hukum
- 3.6 Lahirnya Negara Republik Indonesia
- 3.7 Lembaga negara menurut UUD 1945
- 3.8 Lembaga pemerintahan
- 3.9 Dinamika ketatanegaraan di Indonesia
- 3.10 Hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia menurut UUD 1945
- 3.11 Pemilihan umum
- 3.12 Organisasi Internasional
- 3.13 Perjanjian Internasional
- 3.14 Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif (Depdikbud, 1990, hal. 5).

BAB II

TELAAH KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

Dahulu kurikulum diartikan sebagai sejumlah materi yang akan disajikan kepada siswa, oleh karena itu kurikulum berisikan serentetan bahan pelajaran yang diprogramkan untuk diberikan kepada peserta didik.

Pada kurikulum 1984 istilah kurikulum diberi arti yang lebih luas. Dimana kurikulum dirancang untuk memenuhi kepentingan aspirasi dan kebutuhan hari depan bangsa dan negara. Dan semuanya merupakan mata rantai dari tujuan nasional.

Kurikulum 1984 merupakan perbaikan dari kurikulum 1975. Upaya perbaikan kurikulum tersebut, berlangsung secara bertahap dan terus menerus bertitik tolak dan mengarah pada pemantapan berbagai usaha diantaranya ialah penerapan analisis sistem dalam penentuan bidang minat dan sasaran kurikulum (Depdikbud, 1992, hal. 3).

Salah satu komponen dari analisis sistem dalam pengajaran adalah spesifikasi isi pokok bahasan, disamping komponen lainnya, seperti spesifikasi tujuan, pendekatan dan metoda, alat bantu dan evaluasi. Karena itu guru perlu menganalisis materi pelajaran yang

pokok dan uraian yang telah digariskan dalam GBPP bidang studi yang bersangkutan, dengan memperhatikan buku paket yang berkaitan dengan pokok bahasan tersebut dan sumber-sumber bahan lain yang relevan, supaya tidak terjadi tumpang tindih (overlap) dari materi pelajaran yang disajikan (Tresna Sastriwijaya, 1992, hal. 27).

Langkah operasional dalam menganalisis materi pelajaran itu adalah sebagai berikut:

- 1) Mengkaji pokok bahasan atau sub pokok bahasan
- 2) Menganalisis materi menjadi materi esensial
- 3) Menentukan langkah-langkah penjajian materi dan menggunakan alokasi waktu sesuai dengan keluasaan dan kedalaman materi pokok bahasan yang esensial (Depdikbud, 1992, hal. 76).

Dengan melaksanakan analisis materi pelajaran ini, guru akan lebih mudah menyusun tata urutan materi dan penyataan waktu dalam program semester. Sehingga tata urutan materi yang disajikan memperhatikan urutan logis dalam pengembangan konsepnya, di samping memperhatikan ruang lingkup materinya dengan mata pelajaran lain. Sebab materi pelajaran harus representatif untuk bidang studi yang bersangkutan (Djito Utomo, 1990, hal. 133).

Analisis materi pelajaran juga penting artinya dalam penyataan waktu, antara lain untuk mempertimbangkan tingkat kepentingan materi dan keleluasaannya,

serta memperhitungkan dengan cermat banyaknya hari-hari efektif untuk bertatap muka di kelas selama semester yang bersangkutan (Roestiyah, 1986, hal. 46).

Disamping itu analisis materi pelajaran juga berguna bagi guru untuk merumuskan tujuan pengajaran, dalam hal ini Tujuan Instruksional Khusus, menentukan metoda dan pendekatannya, memilih alat-alat bantu belajarmengajar yang tepat, serta menyusun alat evaluasi yang dituangkan dalam program satuan pelajaran. Dengan demikian dalam menyusun rencana pengajaran agar proses belajar mengajar dapat mencapai tujuan yang diharapkan salah satu langkah yang harus ditempuh adalah analisis materi pelajaran (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992, hal. 68).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 0209/U/1984 guru PMP dan Tata Negara dituntut untuk melakukan analisis materi pelajaran dari kedua mata pelajaran tersebut. Menurut Harun Utuh (1986, hal. 30) kegiatan analisis materi ini dilakukan karena mata pelajaran PMP materinya terdiri dari P4, UUD 1945 dan GBHN serta ditambah dengan Tata Negara dan etika secara murni, tetapi dipilih aspek-aspek yang dapat membentuk kepribadian siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan dalam penyajiannya kepada siswa diberikan dengan menitik beratkan pada sikap dari pada aspek lainnya.

Dalam rangka menghindari supaya tidak terjadi tumpang tindih antara materi PMP dan Tata Negara, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengambil langkah sebagai berikut:

- 1) Membuat pedoman materi PMP dan menentukan referensi kepustakaan untuk membantu guru di sekolah.
- 2) Memberi ciri khas pada PMP untuk membedakannya dengan mata pelajaran PSPB dan Tata Negara.
- 3) Mengadakan penataran dan menyelenggarakan lokakarya nasional PMP.
- 4) Menyusun buku paket dan mengadakan Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP (Harun Utuh, 1986, hal. 14-15)

Dengan adanya langkah-langkah kebijaksanaan untuk penyempurnaan dan penyesuaian lingkup materi bidang studi PMP melalui seleksi konsep atau materi pokok yang telah diambil itu, bagaimana pelaksanaan analisis materinya di SMA Negeri Kota Madya Padang.

B. Kerangka Konseptual

Usaha meningkatkan mutu pendidikan sebagai titik berat pembangunan pendidikan perlu kembali dikaji ulang dari semua komponen pendidikan yang ada, dan selanjutnya mengadakan usaha-usaha perbaikan dan penyempurnaan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di masa datang.

Peningkatan kemampuan guru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan usaha peningkatan mutu,

dimana guru mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai dinamisator kurikulum dan bahan ajar yang dilaksanakan sesuai dengan tingkat dan perkembangan anak didik, jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

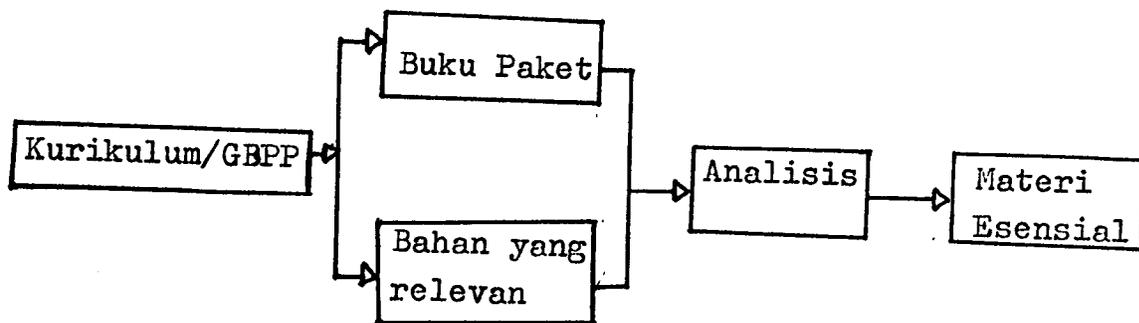
Realita yang terlihat selama ini, guru menjadikan kurikulum ataupun GBPP sebagai tujuan. Akibatnya kalau guru sudah menyelesaikan materi yang disediakan dalam GBPP dan kurikulum tersebut, maka kepuasan sudah mengalir dihati guru. Ternyata anak didik baru menerima pengetahuan yang sangat mentah, dan belum dapat dipergunakannya. Dalam hal ini perlu dipertegas bahwa kurikulum bukanlah tujuan pendidikan, tapi salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sebagai pedoman dalam kegiatan belajar mengajar.

Sehubungan dengan itu, guru dituntut kemampuannya untuk menganalisis materi yang terdapat dalam kurikulum atau GBPP, terutama yang berhubungan dengan kemampuan mendalami materi pelajaran untuk dijabarkan menjadi materi esensial dalam membuat perencanaan pengajaran, yang kemudian akan dilaksanakan dan dievaluasi.

Akibat dari keadaan susunan materi pelajaran semacam ini akan menimbulkan pertanyaan, dimanakah bahan itu seharusnya dipelajari ? Mungkin juga akan menimbulkan rasa bosan, karena pengorganisasian materi tidak

menarik, yang disebabkan oleh materi yang tumpang tindih dan urutan bahan yang tidak sistematis dan tidak logis.

Keadaan yang begini dari hasil pantauan di lapangan dijumpai dalam mata pelajaran PMP dan Tata Negara. Untuk menanggulangi masalahnya maka dituntut keberanian guru PMP dan Tata Negara untuk melakukan analisis materi pelajaran dalam menyusun program pengajaran. Secara skematis langkahnya dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Sesuai dengan judul penelitian ini, dimana areal risetnya adalah Kota Madya Padang, maka populasi penelitian ini adalah seluruh SMA Negeri di Kota Madya Padang, dengan jumlah dua belas buah diwaktu penelitian ini dilaksanakan. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel III.1 berikut ini:

TABEL III.I : SMA NEGERI KODYA PADANG, MENURUT
KECAMATAN

No :	Kecamatan	: SMA Lama	: SMA Baru
1 :	Padang Timur	-	: SMA 11
2 :	Padang Barat	: SMA I, SMA 2:	-
3 :	Padang Utara	: SMA 3	: -
4 :	Padang Selatan	: SMA 6	: -
5 :	Lubuk Begalung	: SMA 4	: -
6 :	Kuranji	: SMA 5	: -
7 :	Koto Tengah	-	: SMA 7, SMA8
8 :	P a u h	-	: SMA 9
9 :	Bungus Teluk Kabung	-	: SMA 10
10 :	Nanggalo	-	: SMA 12
J u m l a h		: 6	: 6

Sumber : Bidang Perencanaan Kanwil Depdikbud Sumatera Barat, 1994.

2) Sampel

Sampel diambil secara bertahap dan berlapis:

Pertama; Dari 12 SMA Negeri diambil 6 SMA menjadi sampel yang digolongkan atas dua kriteria yaitu:

- a) Kriteria SMA yang sudah lama berdiri, ditandai dengan telah pernah melaksanakan kurikulum 1975. Dalam arti SMA yang telah berdiri sebelum tahun 1975.
- b) Kriteria SMA yang dianggap baru, hanya baru melaksanakan proses belajar mengajar dengan kurikulum 1984. Dan SMA yang diambil sebagai sampel itu dapat dilihat pada tabel III.2 berikut ini:

TABEL III.2 : DISTRIBUSI SAMPEL SMA KODYA PADANG

No	Kecamatan	SMA Lama	SMA Baru
1	Padang Barat	SMA 1, SMA 2	-
2	Padang Utara	SMA 3	-
3	Padang Timur	-	SMA 11
4	P a u h	-	SMA 9
5	Bungus Tl. Kabung	-	SMA 10
J u m l a h		3	3

Kedua; Dari 6 SMA sampel di atas, akan diwakili oleh 3 SMA lama dan 3 SMA baru, pada masing-masing SMA baik lama maupun baru akan diambil 2 kelas yang tidak paralel yang mempelajari PMP dan Tata Negara, (tepatnya kelas II A.3 dan kelas III A.3). Dalam hal ini akan terpilih 12 kelas sampel, yaitu 6 kelas dari SMA lama dan 6 kelas dari SMA baru. Dengan catatan untuk SMA

BIBLIOTEKA
KOTA PADANG

12 di Kecamatan Nanggalo, baru berdiri enam bulan dan belum ada kelas II dan kelas III. Dalam penelitian ini Kecamatan Nanggalo tidak dapat diwakili sampel.

Ketiga; Dari hasil wawancara di lapangan diperoleh informasi, bahwa rata-rata setiap bidang studi pada tingkat kelas tertentu di SMA Negeri Kodya Padang mempunyai satu orang guru. Maka dari 12 kelas sampel dari SMA lama dan SMA baru akan terdapat 12 orang guru PMP dan 12 orang guru Tata Negara. Berkaitan dengan kriteria tersebut maka sampel diambil dengan cara Stratified Random Sampling dengan jumlah sampel 50% atau 24 orang guru PMP dan Tata Negara.

B. Jenis, Sumber dan Alat Pengumpul Data

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka diperlukan data, sumber data dan alat pengumpul data sebagai berikut:

1) Jenis Data

- a) Data Primer, yaitu informasi yang diterima dari responden, yang akan mengungkapkan latar belakang pendidikan guru PMP dan Tata Negara. Berkaitan dengan pendidikan terakhir, jurusan dan pengalaman mengajar, serta kemampuan melaksanakan AMP.
- b) Data Sekunder, yaitu informasi yang akan mengungkapkan pelaksanaan analisis materi pelajaran, berupa alokasi waktu dan penyajian bahan dalam

satuan pelajaran yang diterima dari kepala sekolah dalam bentuk dokumentasi.

2) Sumber Data

Data yang menyangkut latar belakang pendidikan diterima dari guru bidang studi PMP dan Tata Negara, sedangkan pelaksanaan analisis materi pelajaran diambil dari dokumentasi alokasi waktu dan satuan pelajaran yang ada pada kepala sekolah. Dan untuk mengontrol uraian materi tersebut, peneliti meminjam catatan siswa yang dipandang paling lengkap tentang uraian materi tersebut. Setelah peneliti melihat dan menchek uraian materi dari kedua sumber data dengan teliti, peneliti memandang bahwa catatan siswa lebih tepat dipakai untuk dianalisis, karena sering terjadi munculnya penyabaran-penyabaran baru dari sudut konsep, yang sebenarnya dalam persiapan mengajar guru tidak dicantumkan.

3) Alat Pengumpul Data

Data yang diperlukan untuk penelitian ini diperoleh dengan menggunakan angket, interviu dan dokumenter. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel III.3 berikut ini:

TABEL III.3 : JENIS, SUMBER DAN ALAT PENGUMPUL DATA

No ;	Jenis Data	Sumber Data	Alat Peng. Data
1	Latar belakang pendidikan		
	a. Pendidikan terakhir:	G u r u	: Angket/Interviu
	b. Jurusan	: G u r u	: Angket/Interviu
	c. Pengalaman mengajar	: G u r u	: Angket/Interviu
2	Pelaksanaan analisis materi pelajaran		
	a. Alokasi waktu	:Kep. Sekolah	: Dokumenter
	b. Penyajian bahan	: Siswa	: Dokumenter
3	Persamaan materi	: Siswa	: Dokumenter

C. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul untuk pengolahan selanjutnya akan diukur dengan persentase yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah materi pokok bahasan yang sama}}{\text{Jumlah seluruh materi pokok bahasan}} \times 100\%$$

(Winarno Surachmad, 1982, hal. 139)

D. Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan atas bantuan dana Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas (OPF) IKIP Padang tahun anggaran 1994/1995. Dengan tahap-tahap pelaksanaan

penelitian sebagai berikut :

- 1) Pengajuan usul penelitian pada pusat penelitian IKIP Padang
- 2) Penilaian oleh pusat penelitian
- 3) Setelah usulan disetujui dilakukan penanda tangan kontrak
- 4) Pemantapan disain
- 5) Penyusunan dan penyempurnaan instrumen
- 6) Pengumpulan data
- 7) Pengolahan dan analisis data
- 8) Penyerahan draf laporan pada konsultan
- 9) Penyerahan draf laporan pada pusat penelitian
- 10) Revisi dan pengadaan
- 11) Penyerahan laporan

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan

1) Latar Belakang Pendidikan

a) Distribusi Pendidikan Terakhir

Berdasarkan data yang diperoleh dari responden menunjukkan bahwa pendidikan terakhir guru PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kodya Padang mayoritas berijazah sarjana, yaitu 22 orang (91,67%). Dan masih ada guru-guru tersebut yang berijazah diploma (D.3), sebanyak 2 orang (8,33%). Dari gambaran tersebut secara implisit menunjukkan guru-guru PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kodya Padang, masih ada yang belum berijazah sarjana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut:

TABEL IV.1 : DISTRIBUSI PENDIDIKAN TERAHKIR GURU PMP DAN TATA NEGARA DI SMA NEGERI KODYA PADANG

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Sarjana	22	91,67
2	Sarjana Muda	-	-
3	Diploma III (D.3)	2	8,33
4	P G S L A	-	-
Jumlah		24	100,00

Sumber : Pengolahan Data Primer, 1994.

b) Jurusan Pendidikan

Ditinjau dari jurusan pendidikan guru-guru PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kodya Padang, ternyata memiliki ijazah yang relevan dengan bidang studi yang diajarkannya. Dimana dari data yang diperoleh, 18 orang (75%) menyatakan berasal dari jurusan PMP/IKN, 5 orang (20,83%) menyatakan berasal dari jurusan IKN/Hukum, dan 1 orang (4,17%) menyatakan berasal dari jurusan PMP/KN. Dengan kenyataan ini dapat disimpulkan bahwa mata pelajaran PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kodya Padang, tidak ditemui guru-guru yang mengajarkannya dengan ijazah yang tidak relevan. Gambarannya lebih jelas dapat dilihat pada tabel IV.2 berikut:

TABEL IV.2 : JURUSAN PENDIDIKAN GURU PMP DAN TATA NEGARA DI SMA NEGERI KODYA PADANG

No :	Jurusan	Frekuensi	Persentase
1 :	Civic Hukum	-	-
2 :	IKN/Hukum	5	20,83
3 :	PMP/IKN	18	75,00
4 :	PMP/KN	1	4,17
5 :	Jurusan lain	-	-
Jumlah		24	100,00

Sumber : Pengolahan Data Primer, 1994

c) Pengalaman Mengajar

Berdasarkan data yang diperoleh dari responden, ternyata guru-guru yang mengajar bidang studi PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kodya Padang, mayoritas guru-guru tua (senior) yang berpengalaman 10 tahun keatas, yaitu sebanyak 15 orang (62,50%). Kemudian disusul oleh guru-guru yang berpengalaman 5 - 10 tahun, yaitu sebanyak 7 orang (29,17%). Namun demikian masih ada diantaranya guru muda (yunior) yang berpengalaman kurang dari 5 tahun, yaitu 2 orang (8,33%). Dalam hal ini berarti pengalaman mengajar guru-guru PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kodya Padang cukup memadai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.3 berikut:

TABEL IV.3 : PENGALAMAN MENGAJAR GURU PMP DAN TATA-NEGARA DI SMA NEGERI KODYA PADANG

No	Strata Pengalaman	Frekuensi	Persentase
1	< 5 tahun	2	8,33
2	5 - 10 tahun	7	29,19
3	> 10 tahun	15	62,50
Jumlah		24	100,00

Sumber : Pengolahan Data Primer, 1994

d) Distribusi Guru menurut Jenis Kelamin

Dengan memperhatikan data yang diperoleh dari responden, ternyata guru yang mengajar PMP dan Tata

Negara di SMA Negeri Kodya Padang hampir berimbang, yaitu sejumlah 14 orang (58,33%) guru wanita, sedangkan guru pria berjumlah 10 orang (41,67%). Dengan kenyataan ini berarti perbandingan guru yang mengajar PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kodya Padang antara pria dan wanita adalah 5 : 7.

2) Pelaksanaan Analisis Materi Pelajaran

Dalam melihat gambaran analisis materi Pelajaran (AMP) dari pelajaran PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kodya Padang, maka kecenderungan penemuan variabel yang digambarkan adalah relevansi alokasi waktu dan penyajian bahan dengan kurikulum atau GBPP.

a) Relevansi Alokasi Waktu dengan Jam yang Tersedia dalam Kurikulum.

Gambaran distribusi data dari alokasi waktu yang ditetapkan oleh guru PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kodya Padang, pada umumnya sesuai atau sama dengan waktu yang ditetapkan dalam kurikulum, yaitu sejumlah 19 orang (79,17%). Kemudian ada 4 orang (16,67%) yang mengatakan kurang dari waktu yang disediakan dalam kurikulum. Namun demikian ada 1 orang (4,16%) yang mengatakan lebih dari waktu yang ditetapkan dalam kurikulum. Dalam hal ini kemungkinan guru-guru PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kodya Padang kurang mempertimbangkan tingkat kepentingan materi dan banyaknya hari-hari efektif untuk bertatap muka di kelas pada

semester yang bersangkutan. Dan gambarannya lebih jelas dapat dilihat pada tabel IV.4 berikut:

TABEL IV.4 : RELEVANSI ALOKASI WAKTU DENGAN JAM YANG TERSEDIA DALAM KURIKULUM

No	Skala Waktu	Frekuensi	Persentase
1	Kurang	4	16,67
2	Sama	19	79,17
3	Lebih	1	4,16
Jumlah		24	100,00

Sumber : Pengolahan Data Sekunder, 1994

b) Kesesuaian Tata Urutan Penyajian Bahan dengan Jadwal Semester dalam Kurikulum

Dari gambaran distribusi data yang diperoleh dari responden, ternyata guru-guru PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kodya Padang, menyajikan bahan pelajaran sesuai atau sama dengan jadwal semester yang telah ditetapkan dalam kurikulum, yaitu 16 orang (66,67%), dan hanya 8 orang (33,33%) yang menyatakan berbeda dengan jadwal semester yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Dari kenyataan ini dapat dikatakan bahwa guru PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kodya Padang, belum semuanya melaksanakan analisis materi pelajaran untuk dijabarkan menjadi materi esensial. Dan kemungkinan mereka masih tetap menjadikan kurikulum sebagai tujuan.

Gambarannya lebih jelas dapat dilihat pada tabel IV.5 berikut:

TABEL IV.5 : KESESUAIAN TATA URUTAN PENYAJIAN BAHAN DENGAN JADWAL SEMESTER DALAM KURIKULUM

No	Skala Penyajian Bahan	Frekuensi	Persentase
1	Sama (sesuai)	16	66,67
2	Berbeda	8	33,33
Jumlah		24	100,00

Sumber : Pengolahan Data Sekunder, 1994

3) Persamaan Materi Pelajaran PMP dan Tata Negara

Untuk mengungkapkan gambaran persamaan materi pelajaran PMP dan Tata Negara, maka pada uraian berikut ini akan dikemukakan materi pokok bahasan/sub pokok bahasan dengan mempedomani persiapan mengajar guru dan catatan siswa di kelas yang paralel, pada semester III, IV, V dan VI, sebagai berikut:

a) Pada Semester III

No	Materi PMP	No	Materi Tata Negara
1	Kerukunan Hidup antar umat beragama	1	Pengertian Negara
2	Semangat kekeluargaan	2	Unsur-unsur terbentuknya negara
3	Hidup bermasyarakat	3	Teori tujuan negara
4	Membela dan mempertahankan kemerdekaan	4	Bentuk negara, pemerintahan dan demokrasi

No : Materi PMP	:	No : Materi Tata Negara
-----------------	---	-------------------------

6 : Rasa persatuan dan ke-:
satuan bangsa

7 : Demokrasi Pancasila :

Dari uraian materi pokok bahasan di atas, maka pada semester III, terdapat persamaan materi pelajaran PMP dan Tata Negara sebesar 18,18%, yaitu berkaitan dengan materi pokok bahasan demokrasi.

b) Pada Semester IV

No : Materi PMP	:	No : Materi Tata Negara
-----------------	---	-------------------------

1 : Hidup sederhana : 1 : Norma-norma hukum

2 : Penghargaan atas hasil:
karya orang lain : 2 : Lahirnya Negara RI

3 : Kesejahteraan sosial : 3 : Lembaga Negara menu-
rut UUD 1945

4 : Tolong menolong sesa- : 4 : Lembaga pemerintahan
ma warga : :

5 : Lembaga perwakilan : :
rakyat : :

Sehubungan dengan uraian materi di atas, maka pada semester IV juga terdapat kesamaan materi PMP dan Tata Negara, yaitu sebesar 22,22%, meliputi uraian materi lembaga perwakilan rakyat dengan lembaga negara menurut UUD 1945, yang berkaitan dengan MPR dan DPR.

MILIK PERPUSTAKAAN
DIPONEGORO

c) Pada Semester V

No : Materi PMP	:	No : Materi Tata Negara
1 : Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa	:	1 : Dinamika ketatanegaraan Indonesia
2 : Hak asasi manusia dalam UUD 1945	:	2 : Hak dan kewajiban warga negara RI
3 : Menggalang persahabatan antar bangsa	;	3 : Pemilihan umum
4 : Pengamalan sila persatuan	:	:
5 : Pengamalan Demokrasi Pancasila	:	:

Dari uraian materi pokok bahasan di atas, maka pada semester V ditemui lagi persamaan materi antara pelajaran PMP dan Tata Negara, sebesar 50%, meliputi hak asasi manusia dalam UUD 1945, hak dan kewajiban warga negara RI, pengamalan Demokrasi Pancasila dan pemilihan umum.

d) Pada Semester VI

No : Materi PMP	:	No : Materi Tata Negara
1 : Pancasila sebagai sumber hukum	:	1 : Organisasi Internasional

No	Materi PMP	:	No	Materi Tata Negara
2	Pengamalan sila Keadilan sosial	:	2	Perjanjian internasional
3	Teknologi dan pembangunan	:	3	Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif
4	Kelestarian hidup bangsa Indonesia	:	4	Hubungan internasional

Dari gambaran materi pelajaran PMP dan Tata Negara seperti tersebut di atas, ternyata pada semester VI pelajaran PMP dan Tata Negara tidak mempunyai persamaan materi pelajaran.

e) Rekapitulasi Keadaan Persentase Materi PMP dan Tata Negara.

No	Semester	:	Persamaan	:	Perbedaan
1	Semester III	:	18,18%	:	81,82%
2	Semester IV	:	22,22%	:	77,78%
3	Semester V	:	50%	:	50%
4	Semester VI	:	-	:	100%
5	Keseluruhan	:	28,57%	:	71,43%

Dari keadaan persentase materi pelajaran PMP dan Tata Negara pada rekapitulasi di atas, ternyata persamaan materi secara keseluruhan (dari semester III, IV, V dan VI), adalah sebesar 28,57%.

B. Pembahasan

Dari hasil temuan yang terdapat pada bahagian terdahulu, dapat dikemukakan gambaran tentang pelaksanaan analisis kurikulum SMA 1984 dalam bidang studi PMP dan Tata Negara di SMA negeri Kodya Padang. Hasil temuan itu mengungkapkan bahwa guru-guru yang mengajar PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kodya Padang, ternyata memiliki ijazah yang relevan dengan bidang studi yang diajarkannya. Hal ini memungkinkan, akan lebih meningkatkan prestasi belajar siswa. Seperti yang dikemukakan Chaidir Asyad (1989, hal. 30) bahwa latar belakang pendidikan guru dan pengalaman mengajarnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sahabuddin (1993, hal. 138) juga ditemukan bahwa kemampuan profesional seorang guru pada hakekatnya adalah muara dari segala penguasaan berbagai materi, keterampilan dan pemahaman yang mendalam tentang proses belajar mengajar. Oleh karena itu, pekerjaan seorang guru dalam arti yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan untuk mengajar bidang studi yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Namun demikian, kalau dilihat dari pelaksanaan analisis materi pelajaran (subject content analysis) oleh guru PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kodya Padang,

ternyata mereka belum semuanya dapat melaksanakan analisis materi pelajaran, dimana dalam menentukan alokasi waktu dan penetapan penyajian bahan pada umumnya (sebesar 73,42%) sama dengan ketentuan yang ada dalam kurikulum. Hal ini mungkin disebabkan oleh guru yang kurang mempertimbangkan tingkat kepentingan materi dan banyaknya hari-hari efektif untuk bertatap muka di kelas pada semester yang bersangkutan. Dan kemungkinan guru masih tetap menjadikan kurikulum sebagai tujuan. Keadaan seperti ini dari hasil penelitian Yasril Yunus (1990, hal. 58) juga ditemukan bahwa guru PMP di SMA Negeri Kodya Padang belum memahami dan melaksanakan sepenuhnya penguasaan materi untuk dijabarkan menjadi materi esensial.

Selanjutnya dari hasil wawancara, tidak dapat diungkapkan dengan memadai tentang faktor-faktor penyebab guru PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kodya Padang belum semuanya melaksanakan analisis materi pelajaran. Hambatan yang dihadapi untuk mengungkapkannya adalah keengganan responden untuk mengemukakan keadaan yang sebenarnya, karena hal itu menyangkut gengsi mereka. Mungkin saja mereka mampu melakukan analisis materi pelajaran (task analysis atau subject content analysis), namun oleh berbagai hal, mereka tidak melaksanakannya. Maka dari itu pada lokasi penelitian ini memerlukan penelitian lebih lanjut.

Kalau dilihat dari persamaan materi pelajaran PMP dan Tata Negara, secara konkrit dan keseluruhan terdapat kesamaan materi sebesar 28,57%. Berdasarkan hasil wawancara hal ini disebabkan oleh guru PMP yang pada umumnya dalam menyampaikan materi pelajaran hanya berpedoman pada buku paket. Tindakan ini sebenarnya sesuai dengan surat edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 8342/C/I/85 tanggal 30 Juli 1985, yang menyatakan karena GBPP mata pelajaran PMP untuk SMA belum diterbitkan, maka untuk menganalisis materi pelajarannya mengacu atau berpedoman pada buku paket terbitan Depdikbud (Depdikbud, 1992, hal. 74).

Walaupun demikian guru PMP dan Tata Negara berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nomor 0209/U/1984, dituntut untuk melakukan analisis Materi pelajaran (AMP), supaya dapat mengetahui ruang lingkup bahan dan alokasi waktu yang diperlukan, sehingga tata urutan materi yang disajikan memperhatikan ruang lingkup materi dengan mata pelajaran lain. Dan hal ini, tidak mungkin akan menimbulkan terjadinya tumpang tindih (overlap) dari materi pelajaran yang akan disajikan pada setiap semester di kelas yang paralel.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan dari penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Pelajaran PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kodya Padang diajarkan oleh guru-guru yang memiliki ijazah yang relevan.

2) Guru PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kodya Padang belum semuanya melaksanakan analisis materi pelajaran (task analysis atau subject content analysis) untuk dijabarkan menjadi materi esensial. Dan masih terdapat persamaan materi pelajaran PMP dan Tata Negara secara keseluruhan sebesar 28,57%.

B. Saran

Dengan melihat temuan, pembahasan dan kesimpulan pada penelitian ini, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

1) Berkaitan dengan kesimpulan nomor 2, maka peneliti menyarankan kepada Kanwil Depdikbud untuk lebih meningkatkan Latihan Kerja Guru (LKG) melalui forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam bidang studi PMP dan Tata Negara. Karena melalui forum ini para guru dapat belajar, bertukar pengalaman dan ber-

latih bersama dengan prinsip dari guru, oleh guru dan untuk guru. Karena hal ini akan dapat meningkatkan kemampuan profesional seorang guru.

2) Sehubungan dengan adanya hambatan yang dihadapi untuk mengungkapkan faktor-faktor penyebab guru PMP dan Tata Negara di SMA Negeri Kodya Padang, belum semuanya melaksanakan analisis materi pelajaran, maka penulis menyarankan, agar dilakukan penelitian lanjutan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan guru belum melaksanakan analisis materi pelajaran (AMP), hal ini akan dapat mengetahui hambatan yang ditemui oleh guru dalam menganalisis materi pelajaran dalam menentukan ruang lingkup bahan dan alokasi waktu yang diperlukan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1984). Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) Tata Negara. Jakarta: Dikdasmen.
- _____. (1992). Materi Latihan Kerja Guru Pendidikan Moral Pancasila. Jakarta: Dikdasmen.
- N,K, Roestiyah. (1986). Masalah Pengajaran Sebagai Suatu Sistem. Jakarta: Bina Aksara.
- Rooijackers, Ad. (1988). Mengajar Dengan Sukses. Jakarta: PT. Gramedia.
- Utomo, Tjipto dan Ruijter. (1988). Peningkatan Dan Pengembangan Pendidikan. Jakarta: PT. Gramedia.
- Utuh, Harun. (1986). Proses Belajar Mengajar Pendidikan Moral Pancasila. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sastrawijaya, Tresna. (1991). Pengembangan Program Pengajaran. Jakarta: Rineka Cipta.
- Surachmat, Winarno. (1982). Pengantar Penelitian, Ilmu Dasar Metoda dan Teknik. Bandung: Tarsito.

Lama mengajar :th,bl
 Pddterakhir : Si/DIII/PEOLA/Sarjana Muda
 Jurusan :
 Jenis Kelamin : Pria/wanita

ANALISIS MATERI PELAJARAN PMP SMA KELASA II

NO	BAHAN PENGAJARAN	Materi	Materi Esensial	Semester	Alokasi Waktu
1	Kerukunan hidup antar umat beragama	2 3	4	5	6
2	Semangat kekeluargaan	1.1. Kerjasama antar umat beragama 1.2. Ketahanan dan stabilitas nasional	- Sikap saling menghormati dan suka kerja sama		
3	Hidup bermasyarakat	2.1. Gotong royong 2.2. Semangat kekeluargaan	- Semangat kekeluargaan dan gotong royong		
4	Perjuangan membela dan memperjuangkan kemerdekaan	3.1. Pengendalian diri 3.2. Keterbukaan	- Kerelaan, keberanian dan keseimbangan		
5	Wawasan Nusantara	4.1. Pengorbanan pahlwan bangsa 4.2. Perjuangan rakyat semesta	- Cinta kepada Bangsa Tanah Air - Relabe korban utk bangsa dan Negara		
6	Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5.1. Makna Wawasan Nusantara 5.2. Makna Konvensi hk. Pant 6.1. Prinsip bhineka tunggal Ika	- Mengembangkan sikap persatuan - Hak dan Kewajiban - Mengembangkan Kesadaran Persatuan dan Kesatuan		

1	2	3	4	5	6
1					
2		6.2. Prinsip Nasionalisme			
3		6.3. Prinsip Kebangsaan yg ber tanggung jawab			
4		6.4. Prinsip wawasan Nusantara			
5		6.5. Prinsip Persatuan dan Pembangunan bangsa			
6		7.1. Makna dan azas demokrasi			
7	Demokrasi Pancasila	7.2. Demokrasi Pancasila dan UUD 1945			
8	Musyawarah untuk mufakat	8.1. Tata cara pengambilan kepts			
9	Hidup kesederhanaan	9.1. Dalam sikap dan perbuatan			
10	Penghargaan hasil karya	10.1. Penghargaan hasil karya usaha-usaha nasional			
11	Azas kekeluargaan untuk menca pai kesejahteraan nasional	11.1.1. Makna dan pelaksanaan - Pasal 33 UUD 1945			
12	Tolong menolong sesama bangsa	12.1. Hakikat manusia			
13	Lembaga perwakilan rakyat	13.1. MPR dan DPR			

- Mengembangkan kesadaran persatuan dan kesatuan Nasional

- Musyawarah untuk mufakat
- Keputusan yang bertang gung jawab
- Tidak memaksakan kehendak

- keserasian hidup dengan masyarakat sekitar

- Mengembangkan rasa bangsa terhadap hasil karya bangsa sendiri
- Sistem perekonomian nasional

- Memelihara dan mengembangkan sikap tolong menolong
- Peranserta untuk melaksanakan ketetapan MPR

Lama mengajar :th,bl
 Pddterakhir : SI/DIII/PSLA/Sarjana Muda
 Jurusan :
 Jenis Kelamin : Pria/wanita

ANALISIS MATERI PELAJARAN TATA NEGARA SMA KLS II

No	BAHAN PENGAJARAN	Pokok Bahasan	Materi	Materi Esensial	Semester	Alokasi Waktu
1		2	3	4	5	6
1	Negara		1.1. Pengertian negara 1.2. Asal mula terjadinya negara	- Negara sebagai organisasi kekuasaan organisasi politik dan kesusilaan		
2	Unsur terbentuknya negara		2.1. Unsur konstitutif 2.2. Unsur Deklaratif 3.1. Menurut para ahli	- Wilayah, rakyat dan pemerintah yang berdaulat - Pengakuan dari negara lain - Teori kekuasaan - Teori Perdamaian dunia - Teori jaminan atas hak dan kebebasan - Tujuan negara RI		
3	Teori-teori tujuan negara			- Kesatuan dan serikat - Monarki dan Republik - Demokrasi dengan sistim parlementer, pemisahan kekuasaan dan referendum		
4	Bentuk negara, pemerintahan dan demokrasi		4.1. Bentuk negara 4.2. Bentuk pemerintahan 4.3. Bentuk demokrasi			

1	2	3	4	5	6
5	Norma-norma hukum dan demokrasi	5.1. Pergaulan hidup dalam negara 5.2. Tata hukum	- Norma agama, kesucilaan kesopanan dan norma hukum - Hukum publik dan H. Pripat		
6	Latar belakang lahirnya negara RI	6.1. Proklamasi 17-8-1945 6.2. Pembukaan UUD 1945	- Norma peraturan tata hukum Indonesia - Pokok kaidah negara yang fundamental		
7	Lembaga negara menurut UUD 1945	7.2. Lembaga tinggi dan tertinggi negara	- MPR, Presiden, DPA, DPR, BPK dan MA		
8	Lembaga pemerintahan	8.1. Lembaga pemt pusat 8.2. Lembaga pemt daerah 8.3. Asas pemt daerah	- Presiden, wki presiden Mentri-mentri negara - Kepala daerah dan DPRD - Asas Sentralisasi, desentrali sasi Dekonsentrasi dan modewind (pembantu)		

KELOMPOK TERPUSATKAAH
KOP PADANG

Lama mengajar :th,bl
 Pddterakhir : SI/DIII/PGSLA/Sarjana Muda
 Jurusan :
 Jenis kelamin : Pria/wanita

ANALISIS MATERI PELAJARAN PHP SMA KLS III

NO	BAHAN PENGAJARAN	Materi	Materi Esensial	Semester	Alokasi Waktu
1	Pokok Bahasan 2	3	4	5	6
1	Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa	1.1. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa	- Toleransi umat beragama		
2	Hak azasi manusia menurut UUD 1945	2.1. Menghormati harkat dan martabat manusia	- Hak memilih dan terpilih - Hak dan kewajiban membela negara - Wajib latih dan wajib bela umum		
3	Mengalng persahabatan antara bangsa	3.2. Menjaga ketertiban dunia dan bersama organisasi-organisasi dunia	- Komprensi Asia - Aprika - PBB (UND) - Perjuangan negara-negara non Blok		
4	Pengamalan Sila Persatuan	4.1. Pengalaman Sila Persatuan Indonesia	- Wawasan Nusantara - Pembinaan bhs Indonesia - Kepribadaian nasional - Kebudayaan daerah sebagai unsur kebudayaan dan nasional - Ketahanan Nasional		

1	2	3	4	5	6
5	Pengamalan demokrasi Pancasila	5.1. Sistem demokrasi Pancasila	<ul style="list-style-type: none"> - Azas musyawarah dan mufakat - Kekuasaan hukum - Kesadaran hukum warga negara 		
6	Pancasila sumber dari segala sumber hukum	6.1. kedudukan Pancasila dalam negara RI	<ul style="list-style-type: none"> - Pancasila sebagai dasar negara - Arti, bentuk dan tujuan hukum - Sumber tertib hukum dalam negara RI 		
7	Pengamalan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	7.1. Azas kekeluargaan dalam ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan dan ciri-ciri pembangunan - Delapan jangka pemerintahan 		
8	Teknologi dan pembangunan	8.1. Pembangunan bangsa Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian dan tujuan pemebangun - Teknologi tepat guna - Pembangunan ekonomi - Kesempatan kerja 		
9	Kelestarian hidup bangsa Indonesia	9.1. Pemeliharaan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawetan tanah dan air - Penghijauan - Pencegah pencemaran - Perlindungan margasatwa 		

Lama mengajar :th,bl
 Podterakhir : SI/0111/PGSA/Sarjana Muda
 Jurusan :
 Jenis Kelamin : Pria/wanita

ANALISIS MATERI PELAJARAN SMA KLS III

NO	BAHAN PENGAJARAN	Materi	Materi Esensial	Semester	Alokasi Waktu
1	Dinamika ketatanegaraan Indonesia	3	4	5	6
2	Hak dan kewajiban warga negara RI menurut UUD 1945	1.1. UUD 1945 I (18-8-1945) 1.2. Konstitusi RIS (27-12-1949) 1.3. UUPS 1950 (17-8-1950) 1.4. UUD 1945 II (5-7-1959) 2.1. Negara Hukum	- Bentuk Negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan menurut UUD 1945. Konstitusi RIS dan UUPS 1950. - Hak Asasi manusia - Penduduk Indonesia - Warga negara Indonesia - Hak dan kewajiban warga negara		
3	Pemilihan umum	3.1. Perwujudan Demokrasi Pancasila	- Undang-undang Pemilu - Pelaksanaan Pemilu		
4	Organisasi Internasional	4.1. Sejarah, tujuan, struktur dan peranan organisasi lembaga Internasional	- PBB, ASEAN, MEE, OPEC, Liga Arab organisasi negara-negara non blok		
5	Perjanjian Internasional	5.1. Perjanjian Bilateral 5.2. Perjanjian Multilateral	- Treaty contract - Law Marking Treaty		
6	Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas aktif	6.1. Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia	- Landasan ideal - Landasan struktural - Landasan operasional		
7	Hubungan Internasional	7.1. Departemen Luar Negeri dan peranannya	- Perwakilan Diplomatik - Perwakilan Konsuler		

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT KEGUJAN DAN ILMU PENDIDIKAN PADANG

LEMBAGA PENELITIAN

GEDUNG REKTORAT IKIP PADANG

Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang Kode Pos: 25131

Telepon: 51260 Pesawat 217-213

Nomor : 065/PT 37 H19/N-4.1.4/1994

13 Juli 1994

Lamp. : -0-

M a l : Mohon izin untuk mengum-
pulkan data penelitian

Kepada : Yth. Sdr. Kepala Kanwil Depdikbud
Provinsi Sumatra Barat
Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Dekan FPIPS IKIP Padang tanggal 29 Juni 1994 Nomor: 855/PT 37. H4. FPIPS/N/1994 yang isinya seperti pokok surat ini, maka dengan ini kami mohon agar Saudara sudi memberi izin kepada Dosen FPIPS IKIP Padang:

No.	Nama	Keterangan
1.	Drs. Karjuni Dt. Maani	Ketua Peneliti
2.	Drs. Syafri Anwar	Anggota Peneliti

untuk mengumpulkan data penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan:

**J u d u l : PELAKSANAAN ANALISIS MATERI PELAJARAN
PMP DAN TATA NEGARA BERDASARKAN
KURIKULUM SMA 1984 DI SMA NEGERI
KOTAMADYA PADANG.**

Lokasi : Kotamadya Padang.

Waktu : 15 Juli s.d 31 Desember 1994.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Ketua

Drs. Azmi, M.A, Ph.D.
NIP. 130252721

S. Kuasa Tgl. 9-7-1994
No. 44/PT37.H19/F.5/
N.1.1/1994

Tembusan Yth.:

1. Bapak Rektor IKIP Padang
2. Kakandepdikbud Kodya Padang
3. Kepala SMAN di Kodya Padang
4. Dekan FPIPS IKIP Padang
5. Ketua Jurusan PMP-KN/FPIPS IKIP Padang
6. Yang bersangkutan